



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERBASIS
AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH TIMUR KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

Farhan Alif Wahyudi
NPM. 21801082142



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG

2022

ABSTRAK

Pemerintah berperan dalam meningkatkan informasi keuangan dalam pengelolaan laporan keuangan, jadi perlu dilakukan reformasi dalam hal penyajian laporan keuangan sebagai acuan dasar. Pengelolaan aset tetap pemerintah daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan menciptakan nilai lebih dalam mengelola aset. Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membiayai kegiatan dan juga pelaksanaan tugasnya memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang telah diperoleh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual pada laporan keuangan berdasarkan PP No 71 tahun 2010. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual pada laporan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun masih 80% dengan kendala berupa sistem informasi, SDM yang kurang memadai, kurangnya tenaga ahli akuntansi dan belum adanya aplikasi (SIMRAL) untuk menunjang sistem tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Aset Tetap, Akrual, Laporan Keuangan, PP No 71 tahun 2010, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The government plays a role in improving financial information in the management of financial statements, so it is necessary to reform the financial statements as a basis. Fixed asset management is an effort to increase effectiveness, efficiency, and create more value in managing assets. The Pamekasan Regency Government in carrying out activities and implementation obtains an allocation of funds from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Therefore, the Pamekasan Regency Government is obliged to prepare financial reports as a form of regional financial reports that have been obtained. The purpose of this study was to determine the application of accrual-based fixed asset accounting in financial statements based on PP No. 71 of 2010. This research method uses a qualitative approach with qualitative descriptive research. The results of this study indicate that the application of accrual-based fixed asset accounting in financial statements is in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010, although it is still 80% with information system constraints, inadequate human resources, shortage of accounting experts and no application (SIMRAL) for support the system.

Keywords: *Effectiveness, Fixed Assets, Accruals, Financial Reports, PP No. 71 of 2010, Local Government.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah berperan dalam meningkatkan informasi keuangan dalam pengelolaan laporan keuangan, jadi perlu dilakukan reformasi dalam hal penyajian laporan keuangan sebagai acuan dasar. Saat ini kebutuhan akan informasi laporan keuangan sangat dibutuhkan, baik di sektor privat maupun sektor publik. Penyajian laporan keuangan yang andal sangat diperlukan agar penulisan laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna. Pengelolaan aset tetap pemerintah daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan menciptakan nilai lebih dalam mengelola aset.

Pemerintah berperan dalam meningkatkan informasi keuangan dalam pengelolaan keuangan, untuk itu perlu melakukan reformasi dalam hal penyajian laporan keuangan dalam dasar yang kuat sebagai acuan Tumbel et al., 2019; Rombebunga et al (2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu menyangkut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan SAP yang sebelumnya tentang kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah. Pada pemerintah daerah, yang menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Diterbitkannya peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang SAP akuntansi akrual telah membawa perubahan besar dalam sistem informasi keuangan di Indonesia yaitu perubahan dari akuntansi kas menjadi akuntansi akrual menjadi akuntansi setahun penuh dalam akuntansi keuangan pemerintah. transaksi. Perubahan mendasar ini, selain diwajibkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga dapat memberikan gambaran lengkap tentang situasi keuangan, memberikan informasi yang nyata tentang hak dan kewajiban, serta berguna dalam menilai hasil operasi.

Dalam peraturan tersebut, terdapat dua entitas yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, yaitu entitas pelapor yang bertanggung jawab atas penyampaian laporan keuangan; dan entitas akuntansi sebagai pengguna anggaran/aset yang diwajibkan untuk melakukan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terkait dengan entitas pelapor. Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi terjadi, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas.

Aset tetap adalah komponen yang nilainya paling besar di dalam neraca atau laporan posisi keuangan sebagian perusahaan, sehingga memerlukan perlakuan yang sesuai dengan akuntansi keuangan yang berlaku. aset tetap adalah salah satu komponen operasi terpenting dalam mendukung operasi perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lasabuda et al (2020) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara” menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun masih ada kendala sebesar 20% yang berupa sistem informasi, SDM yang kurang memadai, kurangnya tenaga ahli akuntansi, dan aplikasi untuk menunjang sistem tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membiayai kegiatan dan juga pelaksanaan tugasnya memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang telah diperoleh. Pemerintah Kabupaten Pamekasan wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah menjadi dasar pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Pemilihan SAP mengenai aktiva tetap diperlukan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah instansi pemerintah. Untuk memperoleh aset tetap diharapkan dana yg jumlahnya relatif material, buat itu diharapkan suatu akuntansi aset tetap agar pengelolaan aset tetap bisa dilakukan menggunakan efisien sebagai akibatnya bisa memberikan manfaat yg aporisma pada instansi tersebut.

Penerapan akuntansi aset tetap diharapkan mampu memenuhi sistem pemerintah yang selama ini dianggap sebagai birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai upaya peningkatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Ruang lingkup untuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.

Dengan adanya fenomena yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat apakah penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemda Timur Pemkab Pamekasan sudah efektif atau belum, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan mengetahui solusi apa yang akan dilakukan ketika menghadapi kendala tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini mengambil judul

“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH TIMUR KABUPATEN PAMEKASAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemda Timur Pemkab Pamekasan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemda Timur Pemkab Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam dunia pendidikan maupun dunia Pemerintahan yang ada di Indonesia. Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No 71 tahun 2010.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa mendatang.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan dalam penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, walaupun masih 80% dengan kendala berupa sistem informasi, SDM yang kurang memadai, kurangnya tenaga ahli akuntansi dan belum adanya aplikasi (SIMRAL) untuk menunjang sistem tersebut.
2. Sebagian SDM yang ada telah siap karena mengikuti bimbingan teknik sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan dalam proses penerapan dan penyajian laporan keuangan masih dilakukan secara manual keuangan menggunakan software yang berupa Microsoft Excel maupun Spreadsheet Google.

4. Adanya PP No 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual maka laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang masih banyak memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Selama melakukan penelitian pada sumber daya manusia dalam objek penelitian tidak dapat membimbing secara langsung karena berkenaan dengan adanya persiapan pilkades.
2. Masih terdapat jawaban yang kurang jelas menurut pengamatan peneliti, dikarenakan narasumber tidak fokus dan ada beberapa yang kurang memahami pertanyaan dalam melakukan wawancara.
3. Peneliti hanya mengambil data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan sebagai tempat penelitian, sehingga penelitian ini sangat rendah untuk digeneralisasikan sebagai pengambilan keputusan.

1.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan analisis terkait Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Timur Kabupaten Pamekasan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya perubahan dalam pencatatan laporan keuangan dari manual menggunakan *Software Microsoft Excel* ke penggunaan aplikasi seperti SIMRAL.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan sudah cukup baik dalam penerapan aset tetap berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan, hanya saja ada kekurangan dalam penyajian yang ada pada laporan keuangan, ada yang tidak dicantumkan ke dalam laporan keuangan khususnya laporan perubahan ekuitas yang belum dijelaskan akun-akun dalam laporan perubahan ekuitas pada CaLK (Catatan Laporan Keuangan) secara rinci.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak mengambil satu dinas sebagai tempat penelitian, namun alangkah lebih baiknya untuk meneliti di bagian BPKAD agar mendapatkan informasi yang lebih banyak dan dapat digeneralisasikan sebagai pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimus, E. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 52–63. <https://doi.org/10.35906/ja001.v6i1.543>
- Astuti, E. (2012). *Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 15 No. 02, Januari 2014*. 14(02), 149–158.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ely Suhayati, Sri Dewi Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan, Edisi Pertama*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Harun, H. Van Peurse, K. Eggleton, I. 2012. Institutionalization of Accrual Accounting in the Indonesian Public Sector. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 8:257-285 diakses 6 Januari 2017.
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23. <https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-23>
- Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going*

Concern : *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 167.
<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28068.2020>

Manado, C. V. K. (n.d.). *aset tetap, psak no.16. 1*(16), 190–198.

Moleong. Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Ramadja Karya.

Moleong, L. J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Panggara, R. (2012). *Analisis kinerja keuangan : panduan bagi akademisi, manajer, dan investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari aspek keuangan*. 90. <http://library.stik-ptik.ac.id>

Shanti, Y. K. (2018). Analisis Penerapan Basis AkruaI Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 43.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p43-60>

Suharli, Michell. 2006. *Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang*. Edisi Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umadji. Pratama. dan Rosita. 2006. *Kamus Ekonomi*. Penerbit WIPRESS. Jakarta.